

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Mahrus. 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2011, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2016, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta.
- Ali, Zainuddin. 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amirudin dan Asikin, Zainal. 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi. 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2014, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli. 2004, *Sekitar Masalah Korupsi*, Mandar Maju, Bandung.
- Badoh, Ibrahim Z. Fahmy., dan Dahlan, Abdullah., 2010, *Korupsi Pemilu Di Indonesia*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta,
- Budiarjo, Miriam. 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Chazawi, Adami. 2003, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi Di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Constanzo, Mark. 2008 *Aplikasi Psikologi dalam Sistem Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- BPHN, 2015, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.

- Danil, Elwi. 2014, *Korupsi; Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Rajawali Pers, Jakarta.
- El-Muhtaj, Majda. 2009, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Fachmi, 2011, *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia Publishing, Bogor.
- Farid, A. Zaianal Abidin. 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Farid, A. Zainal Abidin., dan Hamzah, Andi. 2006, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*, Rajawali Press, Jakarta.
- Fariz, Donal. 2013 “Proyek Ambisius Pembentukan Pengadilan Tipikor”, dalam *Putih Hitam Pengadilan Khusus*, Sekertariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Friedman, Lawrence M. 2015, *Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung.
- Garner, Bryan A. (ed). 2009, *Black’s Law Dictionary*, Deluxe Ninth Edition, West, ST. Paul.
- Gunarto, Marcus Priyo. 2007, *Perkembangan Unsur Delik Korupsi*, Marginal Press, Yogyakarta.
- Gray, Cheryl., Hellman, Joel., Ryterman, Randi., 2004, *Anticorruption in Transition 2: Corruption in Enterprise-State Interactions in Europe and Central Asia 1999–2002*, World Bank, Washington.
- Hadikusuma, Hilman. 2005, *Bahasa Hukum*, Alumni, Bandung.
- Hamzah, Andi. dan Rahayu, Siti. 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. dan Sumangelipu, A. 1985, *Pidana Mati Di Indonesia; Di Masa Lalu, Kini dan Di Masa Depan*, Gahlia Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 1993, *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori dan Praktek; (Penahanan-Dakwaan-Requisitoir)*, Rineka Cipta, Jakarta.

- \_\_\_\_\_. 2013, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2014, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2015, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S. 2014, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2016, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Indriati, Etty. 2014, *Pola dan Akar Korupsi: Menghancurkan Lingkaran Setan Dosa Publik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Jonkers, J.E. 1987, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Bina Aksara, Jakarta.
- Husein, Harun M. 1994, *Surat Dakwaan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Indrayana, Denny. 2016, *Jangan Bunuh KPK: Kajian Hukum Tata Negara Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi*, Malang, Intrans Publishing.
- Kaligis, O.C. 2011, *Kejahatan Jabatan dalam Sistem Peradilan Terpadu*, Alumni, Bandung.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V. 2016, *Bandan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*.
- Kansil, C.S.T. 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. Palendeng, Engelen R. dan Musa, Altje Agustin. 2009, *Tindak Pidana dalam Undang-undang Nasional*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Kasim, Ifdal. 2005, *Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik*, ELSAM, Jakarta.
- Kelsen, Hans., 2006, *Teori Hukum Murni*, Nusamedia & Nuansa, Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2014, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung.
- Klitgaard, Robert., 2005, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006, *Memahami Untuk Membasmi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.
- Kurnia, Titon Slamet. 2015, *Interpretasi Hak-hak Asasi Manusia oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Krisnawati, Dani., Hiariej, O.S. Eddy., Gunarto, Priyo Marcus., Riyanto, Sigid., Supriyadi. 2006, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Askara, Jakarta.
- Kristiadi, J. 2009, “Demokrasi dan Korupsi Politik”, dalam *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2010, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. dan Lamintang, Theo. 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2013.
- Lasmadi, Sahuri., Rahayu, Sri., Sudarti, Elly. Wahyudi, Dheny., dan Erwin, 2013, “Disparitas Pidana Putusan Hakim tentang Tindak Pidana Korupsi”, dalam *Disparitas Putusan Hakim; Identifikasi dan Implikasi*, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.
- Leyh, Gregory., 2015, *Hermeneutika Hukum: Sejarah, Teori dan Praktik*, Nusamedia, Bandung.
- Madril, Oce., Syarif. Laode M., Wijayanta, Tata., Tanpa Tahun, “Pendahuluan”, dalam Laode M. Syarif, Didik E. Purwoleksono (ed), *Hukum Anti Korupsi*, Tanpa Penerbit.
- Maheka, Arya. Tanpa Tahun, *Mengenal dan Memberantas Korupsi*, KPK, Jakarta.
- Makarao, M. Taufik., dan Suhasril. 2010, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2011, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta.

- Maramis, Frans. 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Marapaung, Laden. 2005, *Asas Teori Prakek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marwan, M. dan P. Jimmy. 2009, *Kamus Hukum*, Gama Press, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2008, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2009, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Moeljatno. 1999, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Montesquieu, 2007, *The Spirit of Laws : Dasar-dasar Ilmu Hukum dan Politik*, Nusamedia, Bandung.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi. 2010, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Mulyadi, Lilik. 2000, *Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Napitupulu, Diana. 2010, *KPK in Action*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- ND. Mukti Fajar dan Achmad, Yulianto. 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Poernomo, Bambang. 1985, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prakoso, Djoko. 1988, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Pramono, R. Widyono., 2016, *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya: Sebuah Perspektif Jaksa dan Guru Besar*, Kompas, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh. 2013, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2014, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

- Rahardjo, Satjipto. 2004, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Remmelink, Jan. 2003, *Hukum Pidana: Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sahetapy, J.E. 2009, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Setara Press, Malang.
- \_\_\_\_\_. 2012 “Reformasi Hukum Harus Mengejawantakan Pancasila”, dalam *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.
- Said, Umar. 2009, *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah dan Dasar-dasar Tata Hukum Serta Politik Hukum Indonesia*, Malang, Setara Press.
- Sakidjo, Aruan dan Poernomo, Bambang. 1990, *Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Setiadi, Wicipto. 2012, “Arti Penting Lembaga-lembaga Hukum Di Indonesia dalam Merespon Perubahan Sosial”, dalam *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.
- Simorangkir, J.C.T., Erwin, Rudy T., Prasetyo, J.T. 2007, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sinaga, Benhard. 2013, *Kitab Saku KUHP dan KUHP Lengkap dengan Penjelasan dan Revisinya*, Marsindo Publishing, Depok.
- Soekanto, Soerjono. dan Mamudji, Sri. 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soerodibroto, R. Soenarto. 2016, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soesilo, R. 1995, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Poelita, Bogor.
- Solehuddin, M. 2004, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.

- Sudarto. 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sulistia, Teguh. dan Zurnetti, Aria. 2011, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Surachman, RM dan Maringka, Jan S. 2015, *Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana di Kawasan Asia Pasifik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suratman dan Dillah, Philipus 2015, *Metode Penelitian Hukum; Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Syarif, Laode M. dan Purwoleksono, Didik E. (ed). Tanpa Tahun, *Hukum Anti Korupsi*, USAID, Kemitraan dan Asia Foundation, Tanpa Penerbit.
- Utrecht, E., 1960, *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Jakarta.
- Wijayanto, 2009, “Memahami Korupsi”, dalam *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Wiyanto, Roni. 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Wiyono, R., 2012, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yusuf, Muhammad. 2013, *Merampas Aset Koruptor*, Kompas, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801.



Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption*, 2003. (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi, 2003). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620.

Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.



Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656.

Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Konsep Tahun 2015.

### **C. Karya Imiah, Jurnal, Surat Kabar dan Internet**

Alfauzi, Rangga. 2016, “Penjatuhan Pidana Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan HAM”, *Tesis*, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Baryanto, “Urgensi Reformulasi Tindak Pidana Korupsi Bagi Indonesia”, *Varia Peradilan*, Volume. XXVII, Nomor. 325, Desember, 2012.

“Buletin Mingguan Anti-Korupsi: 25 Februari – 2 Maret 2016”, diakses dari [www.antikorupsi.org/id/content/bulletin-mingguan-anti-korupsi-25-februari-2-maret-2016](http://www.antikorupsi.org/id/content/bulletin-mingguan-anti-korupsi-25-februari-2-maret-2016), Tanggal 7 Januari 2017.

Dewi, Kadek Krisna Sintia. 2014, “Efektifitas Penerapan Ancaman Sanksi Pidana Tambahan Guna Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Denpasar)”, *Tesis*, Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Udayana, Denpasar.

Diklat Keuangan Malang, 2015, “Sistem Merit, Kompetensi dan Kinerja dalam UU ASN”, diakses dari <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/berita-malang/21290-sistem-merit,-kompetensi-dan-kinerja-dalam-uu-asn>, Tanggal 31 Maret 2017.

“Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia” diakses dari <https://putusan.mahkamahagung.go.id>, Tanggal 8 Agustus 2016.

Firdaus, Sunny Ummul. 2016, “Pembatasan Hak Politik Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia (Studi Tentang Formulasi *Parliamentary Threshold* Dan

*Electoral Threshold*”, *Disertasi*, Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Hiariej, Eddy O.S., “Membasmi Korupsi”, *Mimbar Hukum*, Nomor 51, Bulan Oktober, Tahun 2005.

Hendardi, Pencabutan Hak Politik Koruptor, *Suara Pembaharuan*, Tanggal 27 September 2014.

“Jejak Kasus,” diakses dari <https://acch.kpk.go.id/id/tema/penindakan/jejak-kasus>, Tanggal 8 Agustus 2016.

Maharani, Dian. “Ini Alasan Hak Politik Djoko Susilo Dicabut”, diakses dari [www.nasional.kompas.com/read/2013/08/21/1737178/Ini.Alasan.Hak.Politik.Djoko.Susilo.Dicabut](http://www.nasional.kompas.com/read/2013/08/21/1737178/Ini.Alasan.Hak.Politik.Djoko.Susilo.Dicabut), Tanggal 26 Desember 2016.

Nurbaningsih, Enny., “Membangun Parlemen Lokal Yang Anti Korupsi”, *Mimbar Hukum*, Nomor 51, Bulan Oktober, Tahun 2005.

“Pengertian Korupsi”, diakses dari [www.ti.or.id/index.php./glossary/list/1/ALL](http://www.ti.or.id/index.php./glossary/list/1/ALL), Tanggal 28 Oktober 2016.

“Perbaiki Penegak Hukum, Perkuat KPK, Benahi Layanan Publik”, diakses dari [www.ti.or.id/index.php/publication/2016/01/27/corruption-perceptions-index-2015](http://www.ti.or.id/index.php/publication/2016/01/27/corruption-perceptions-index-2015), Tanggal 7 Januari 2017.

Siregar, Bintomawi. 2015, “Disparitas Putusan Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Pengadilan Negeri Jakarta Barat”, *Tesis*, Magister Hukum Litigasi Kampus Jakarta, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

“Tanya Jawab Tanggal 19 Agustus 2014”, diakses dari <http://jimly.com/tanyajawab?page=223>, Tanggal 15 April 2017.

“Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Profesi/Jabatan Update 31 Desember 2016” diakses dari <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan>, Tanggal 1 Maret 2017.

#### **D. Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 4/PUU-VII/2009, Tanggal 25 Maret 2009.

- Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1195  
K/Pid.Sus/2014, Tanggal 15 September 2014.
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1240  
K/Pid.Sus/2014, Tanggal 7 Oktober 2014.
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2427  
K/Pid.Sus/2014, Tanggal 8 April 2015.
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285  
K/Pid.Sus/2015, Tanggal 23 Februari 2015.
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 336  
K/Pid.Sus/2015, Tanggal 23 Februari 2015.
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1261  
K/Pid.Sus/2015, Tanggal 8 Juni 2015.
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2819  
K/Pid.Sus/2015, Tanggal 4 Februari 2016.
- Putusan Pengadilan Tinggi D.K.I Jakarta Nomor 36/PID/TPK/2013/PT.DKI,  
Tanggal 18 Desember 2013.
- Putusan Pengadilan Tinggi D.K.I Jakarta Nomor 25/PID/TPK/2015/PT.DKI,  
Tanggal 19 Agustus 2015
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor  
76/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst, Tanggal 26 November 2015.